



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RISWAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 446346

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 968.090.000

1. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
3. Tanah Seluas 567 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 153.090.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CALYA 1.2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.514.314

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.158.104.314

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.158.104.314

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.